

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN BUMDES BINA SEJAHTERA KEMBANG KERANG, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Abdul Malik Akbar¹

[alikhaksara@gmail.com](mailto:alikaksara@gmail.com)

¹*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*

Elin Erlina Sasanti²

elinerlina@unram.ac.id

²*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*

Adhitya Bayu Suryantara³

adhityabayus@unram.ac.id

³*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*

R Sapto Hendri BS⁴

saptohendri99@unram.ac.id

⁴*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pada salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Lombok Timur yakni BUMDes Bina Sejahtera di Desa Kembang Kerang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas dan transparansi BUMDes Bina Sejahtera ke pihak pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Bina Sejahtera telah akuntabel dan transparan dalam pengelolaan BUMDes. BUMDes Bina Sejahtera dalam menyusun laporan keuangan menyertakan bukti transaksi, dan untuk laporan keuangan telah memuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dengan klasifikasi akun yang jelas. Untuk dokumen kegiatan BUMDes telah tersedia lengkap dan bisa diakses oleh masyarakat langsung ke Kantor BUMDes Bina Sejahtera. Pengelolaan kegiatan BUMDes dilaporkan setiap setahun sekali dalam musyawarah desa ke pihak pemerintah desa dan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Laporan Keuangan, Pengelolaan BUMDes, Transparansi

ABSTRACT

This study analyzes the accountability and transparency of management at one of the BUMDes in East Lombok Regency, namely BUMDes Bina Sejahtera in Kembang Kerang Village. This study aimed to determine the extent of accountability and transparency of BUMDes Bina Sejahtera to the village government and the community. This study uses a descriptive qualitative approach, collecting data through observation, interviews, and documentation. The results showed that BUMDes Bina Sejahtera was accountable and transparent in the management of BUMDes. BUMDes Bina Sejahtera in compiling financial reports includes evidence of transactions, and the financial statements contain statements of financial position and income statements with clear account classifications. The complete BUMDes activity document can be accessed by the public directly at the BUMDes Bina Sejahtera Office. The management of BUMDes activities is reported once a year in village meetings to the village government and the community.

Keywords: *Accountability, BUMDes Management, Financial Reports, Transparency*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat serta pemerintahan desa dalam upaya menumbuh kembangkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Dalam menjalankan usaha, prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi BUMDes (Pramita, 2018). Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2015 tentang BUMDes, memiliki maksud yakni menumbuh kembangkan perekonomian desa, meningkatkan sumber pendapatan asli desa, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa yang diperuntukkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat desa, dan sebagai pembuka jalan untuk kegiatan usaha di desa.

Pihak pengelola BUMDes harus mengelola potensi yang ada di desanya dengan baik serta dapat memberikan laporan dari apa yang telah dikerjakannya, termasuk laporan biaya pengeluaran dan pemasukan BUMDes. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes menyatakan bahwa pelaksana operasional berwenang membuat laporan keuangan untuk seluruh unit usaha BUMDes yang dibuat dalam sistem akuntansi yang sederhana, selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa juga mengharuskan BUMDes membuat laporan pertanggungjawaban yang memuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan keuangan berperan penting dalam memahami apakah usaha yang dilakukan sejalan dengan potensi desa yang ada, oleh karena itu akuntabilitas dan transparansi perlu ditekankan dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes.

Dilansir pada www.liputan6.com (2021), Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Peluncuran Sertifikat Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BUMDes di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Senin 20 Desember 2021 menyampaikan sejak dikeluarkannya dana desa pada 2015 hingga saat ini, jumlah BUMDes yang terbentuk meningkat tajam hingga 600,6 persen, yaitu sekitar 8.100 BUMDes pada tahun 2014 menjadi 57.200 BUMDes pada tahun 2021. Berkembangnya jumlah BUMDes di Indonesia diikuti juga oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sampai dengan tahun 2021 memiliki 1005 BUMDes yang tersebar diseluruh Kabupaten yang ada di NTB.

Provinsi NTB dalam Penguatan BUMDes telah didukung dengan adanya kerjasama antara Perusahaan Umum (Perum) Bulog Divre NTB dengan PT.Gerbang NTB Emas (Persero) dikutip dari (www.ntbprov.go.id, 2019). Kerja sama ini dipersiapkan untuk menjadikan BUMDes yang ada di NTB menjadi pusat perdagangan dan distribusi logistik. Program kerjasama yang direncanakan untuk membangun dan memberdayakan BUMDes dengan teknologi tepat guna dengan pembuatan jaringan distribusi Maha desa yang disebut aplikasi TDC (Trade and Distribution Centre). Mengingat produk bahan pokok yang dikeluarkan oleh Bulog berupa beras, gula, minyak dan telur yang disiapkan dengan harga yang lebih murah sebagai pelayanan BUMDes baik secara online maupun offline dengan harapan kerja sama ini dapat menjadikan BUMDes sebagai pusat perdagangan dan distribusi logistik.

Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam organisasi pelayanan masyarakat. Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk laporan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga proses pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga dapat diukur tingkat akurasi keberhasilan akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. Selain prinsip akuntabilitas, transparansi juga dibutuhkan dalam pengelolaan BUMDes sebagai alat untuk

mendorong keterbukaan atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa, agar masyarakat desa dapat mengetahui dan mengakses dengan mudah bagaimana keluar masuknya dana yang telah diberikan. Transparansi dapat ditandai apakah kebijakan, regulasi, program, dan anggaran serta kegiatan yang dilakukan pemerintah terbuka pada masyarakat.

BUMDes dalam pelaksanaannya bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan aset-aset desa, membangun ekonomi, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Meningkatnya jumlah BUMDes yang sangat tinggi tidak sesuai dengan tujuan awalnya dimana banyak penelitian yang menyatakan bahwa masih banyak BUMDes yang tidak melaporkan pengelolaannya. Dilansir dari www.cnnindonesia.com (2019), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya melakukan pembinaan penggunaan dana desa dalam rangka pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa. Hasil uji peraktik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap BUMDes se-Indonesia, sebagai berikut :

Tabel 1. Uji Petik BPK Terhadap BUMDes Se-Indonesia

BUMDes (Unit)	Keterangan
2.188	BUMDes telah didirikan dan tidak beroperasi
1.670	BUMDes belum memberi kontribusi bagi pendapatan desa
1.034	BUMDes tidak menyampaikan laporan
871	BUMDes belum didukung dengan studi kelayakan
864	BUMDes belum teratur dalam penatausahaan dan pelaporan
585	BUMDes belum ditunjang oleh pengelola yang kompeten
547	BUMDes unit usahanya belum sesuai dengan potensi desa

Sumber: www.cnnindonesia.com (2019)

Jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten Lombok Timur sampai dengan akhir tahun 2021 yakni 238, salah satunya BUMDes Bina Sejahtera Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel. BUMDes Bina Sejahtera termasuk dalam salah satu BUMDes yang berkembang di Kabupaten Lombok Timur dibuktikan dengan adanya empat unit usaha yang dijalankan. BUMDes Bina Sejahtera dibentuk pada tanggal 28 Desember 2015 dengan harapan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat. BUMDes ini memiliki empat unit usaha terdiri dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes), BUMDes Mart, dan Bank Sampah. Karena memiliki empat unit usaha tentunya akan banyak program yang dilaksanakan termasuk pengelolaan untuk masing-masing unit yang seharusnya dilaporkan ke pemerintah desa dan terbuka pengelolaannya kepada masyarakat.

Dalam observasi awal, diketahui pengelolaan laporan keuangannya ditemukan kendala terkait penyusunannya. Laporan keuangan pada BUMDes Bina Sejahtera masih dilakukan sederhana yakni disusun menggunakan excel kemudian dimasukkan ke aplikasi akuntansi yang sudah dibeli, walaupun begitu terdapat masalah dalam memasukan data. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami akuntansi, keterbatasan ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dibuat sehingga berpotensi mempengaruhi bagaimana pelaporan dan keterbukaan terhadap pengelolaan BUMDes.

Terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMDes ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan untuk penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Maslika et al. (2021) menyatakan bahwa pengelolaan BUMDes sudah dilakukan secara akuntabel dan transparan walaupun dalam laporan keuangan yang dibuat masih ada yang belum sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditentukan yakni SAK ETAP. Berbeda dengan hasil penelitian Haeruddin & Mariana (2021) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat BUMDes tidak tepat waktu dan akurat, berarti BUMDes tersebut belum

menerapkan prinsip akuntabilitas. Sama halnya dengan penelitian Pakaya & Rorong (2019) mengungkap bahwa BUMDes terkait kesediaan dan aksesibilitas dokumen belum disediakan, kejelasan dan kelengkapan informasi yang ada belum memadai terutama untuk masyarakat, dan untuk proses pengelolaan BUMDes secara teknis maupun administratif masih belum berjalan baik. Oleh karena itu bisa dikatakan BUMDes belum menerapkan prinsip transparansi.

Melihat hasil penelitian terdahulu di atas maka penting dilakukan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes agar dapat mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pemerintahan. Adapun kebaharuan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah (1) perbedaan lokasi penelitian, (2) pada penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan BUMDes sedangkan pada penelitian saat ini tidak hanya membahas laporan keuangannya termasuk juga pengelolaan BUMDes.

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pada BUMDes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kecamatan Aimel, Kabupaten Lombok Timur.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini memaknai hubungan antara prinsipal (pemilik) dengan agen (manajemen) yang dimana agen diberi amanah dan wewenang untuk mengurus, mengatur dan mengelola beberapa jasa untuk kepentingan mereka (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan ini muncul ketika ada hubungan kerja antara satu orang atau lebih, prinsipal memberi wewenang dan bekerja sama dengan orang lain (agen) untuk mendapatkan otoritas dalam menjalankan perusahaan. Agen wajib melaporkan dan memberikan informasi kepada prinsipal karena agen lebih mengetahui keadaan perusahaan daripada prinsipal (Zoebar & Miftah, 2020).

Implikasi teori ini bahwa pengelola BUMDes (agen) yang telah diberikan amanah dan wewenang harus melaporkan pengelolaan BUMDes secara akuntabel dan transparan kepada pemerintah desa (prinsipal). Selain itu, pemangku kepentingan selaku pengguna informasi harus diberikan informasi yang dibutuhkan secara menyeluruh untuk meminimalisir timbulnya konflik dan asimetri informasi antara pihak prinsipal dan agen. Terkait kinerja pada pengelolaan BUMDes akan terus dievaluasi oleh pemerintah desa (prinsipal) sehingga BUMDes mampu lebih berkembang dan maju dengan pengelolaan yang baik dan benar.

Good Corporate Governance

Menurut Manossoh (2016) *good corporate governance* merupakan suatu sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur pola hubungan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan pemangku kepentingannya. *Good Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kinerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Adapun tujuan penerapan *good corporate governance* pada suatu perusahaan yakni mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para *shareholder* dan *stakeholder* perusahaan, meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian (Fatimah et al., 2017).

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak

pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selain itu juga menurut Rusdiana & Nasihudin (2018) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Menurut Ulum & Sofyani (2016) buku "Akuntansi (Sektor) Publik" mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu Akuntabilitas Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas Keuangan Pengungkapan dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta Akuntabilitas Kinerja yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran atas pemberian mandat atau amanahnya

Transparansi

Menurut Mardiasmo (2018) mengungkapkan transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya. Untuk pengukuran transparansi dalam penelitian ini akan mengadopsi indikator transparansi penelitian Pakaya & Rorong (2019) antara lain kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan Kualitatif. Pada pendekatan ini, penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan proses (Siyoto & Sodik, 2015). Data yang akan diinterpretasikan adalah data yang ditemukan di lapangan sesuai dengan prosedur pengumpulan data penelitian yakni melalui observasi, wawancara, dan dokumen terkait pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera Desa Kembangan Kerang.

Prosedur pengumpulan data yakni melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan lokasi penelitian di BUMDes Bina Sejahtera Desa di Jalan Segara Anak Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada penelitian ini untuk menjamin keabsahan data digunakan dua cara yaitu triangulasi dan *member check*. Triangulasi yakni teknik untuk memeriksa data dengan membandingkan data dari berbagai sumber data (Sugiono 2017). Data yang akan dibandingkan yakni hasil dari berbagai sumber wawancara dan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terakhir akan dilakukan pengecekan data dengan melakukan konfirmasi kembali kepihak pemberi data.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dirangkum dengan mengambil intinya, kemudian akan disajikan uraian singkat. Setelah data disajikan akan diambil kesimpulan terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMDes dengan memperhatikan indikator yang digunakan sehingga didapat hasil yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian desa dengan menggerakkan masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif dalam

mengelola potensi desanya, menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran yang ada di desa setempat serta untuk menambah Pendapatan Asli Desa. Adanya aliran dana dari desa dan pengelolaan sumber daya desa oleh BUMDes memberikan kewajiban bagi BUMDes untuk melaporkan kegiatannya baik ke pihak desa maupun masyarakat sehingga pengelolaannya haruslah akuntabel dan transparan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta diperkuat dengan dokumentasi dijabarkan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera yang ada di Desa Kembang Kerang. Hasil penelitian dipaparkan ke dalam beberapa indikator penelitian. Indikator yang digunakan untuk akuntabilitas mengadopsi dari Ana & Ga (2021) yang terdiri dari integritas keuangan, pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator transparansi mengadopsi dari Pakaya & Rorong (2019) terdiri dari kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, dan keterbukaan proses.

Pihak pengelola BUMDes Bina Sejahtera yang diketuai oleh Bapak Kamarudin diberikan wewenang dalam menjalankan segala bentuk aktivitas pengelolaan pada BUMDes, unit-unit usaha yang ada terdiri dari PAMDes, BUMDes Mart, Bank Sampah, dan Lembaga Keuangan Masyarakat Syariah (LKMS). Masing-masing unit yang ada menjalankan kegiatannya harus sesuai dengan kepentingan masyarakat, sehingga untuk mengetahui apakah kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes Bina Sejahtera sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat yakni dengan melakukan pelaporan. Bentuk pelaporan tentu dilakukan dengan berbagai cara yang tentunya haruslah disediakan dokumen-dokumen seperti dokumen rencana kegiatan, dokumen laporan keuangan, dokumen pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tahunan, dan lain-lain. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana akuntabilitas yang dilakukan oleh BUMDes Bina Sejahtera dan bagaimana keterbukaannya kepada pihak pemerintah desa dan masyarakat terkait pengelolaannya. Untuk hasil dari penelitian ini dijabarkan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Akuntabilitas Keuangan BUMDes Bina Sejahtera

1. Integritas Keuangan

Integritas keuangan dilihat dari kesesuaian antara laporan keuangan yang dibuat BUMDes dengan sumber-sumbernya, seperti angka pada nota transaksinya dan laporan keuangan yang dibuat juga haruslah dideskripsikan sesuai dengan prinsip akuntansi. Selain itu juga laporan yang dibuat haruslah menggambarkan kondisi sebenarnya dari BUMDes Bina Sejahtera dan laporan keuangan yang dibuat haruslah mudah dipahami.

Pengamatan yang dilakukan pada BUMDes Bina Sejahtera menemukan bahwa dalam laporan yang dibuat oleh pihak BUMDes terutama bendahara yang mencatat segala transaksi yang dilakukan, bahwa BUMDes telah mencatat laporan keuangan sesuai dengan angka dan sumber-sumber yang ada. Bendahara BUMDes Bina sejahtera dalam mencatat berbagai transaksi yang ada dilakukan beberapa tahap mulai dari mencatat pada buku catatan pribadi atau langsung dicatat pada komputer dan terakhir akan dimasukkan ke aplikasi akubumdesnya. Ketua BUMDes Bina Sejahtera M. Kamarudin menyatakan bahwa formulir seperti nota transaksi BUMDes dipegang oleh bendahara sebagai sumber pencatatan keuangan, kemudian laporan keuangan yang dibuat dilaporkan di akhir tahun pada musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat.

Laporan keuangan yang dibuat BUMDes Bina Sejahtera sudah jelas dan mudah dipahami, pihak pemerintah desa mengatakan bahwa jelas disana memuat untung dan ruginya. Dalam laporan keuangan yang telah disusun BUMDes jelas memuat laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi, dengan adanya dua komponen laporan ini dapat

memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk memahami laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Bina Sejahtera.

Pihak pengelola BUMDes mengatakan bahwa telah dilakukan pelaporan keuangan setiap akhir tahun pada kegiatan pertanggungjawaban kegiatan BUMDes kepada pihak pemerintah desa dan juga masyarakat, hal ini dibuktikan dengan pernyataan Kepala Desa Kembang Kerang dan BPD serta masyarakat bahwa benar telah dilakukan pelaporan keuangan pada kegiatan musyawarah desa di akhir tahun, dibuktikan juga dengan adanya dokumen laporan keuangan dan laporan tahunan BUMDes yang telah tersedia.

Selain itu pernyataan-pernyataan dari informan didukung oleh dokumen-dokumen yang ada seperti nota transaksi, catatan harian bendahara BUMDes, data *microsoft excel*, dokumen rencana kegiatan, laporan keuangan dan laporan tahunan BUMDes.

2. Pengungkapan

Pengungkapan dilakukan dengan cara penyampaian informasi mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Bina Sejahtera. Laporan keuangan yang dibuat oleh pihak pengelola BUMDes Bina Sejahtera sudah memuat kondisi keuangan yang sedang dialami, dalam laporan keuangan yang dibuat sudah memuat laporan keuangan untuk masing-masing unit, kemudian terdapat juga laporan konsolidasi yang memuat laporan keuangan untuk seluruh unit. Adanya laporan konsolidasi ini mempermudah untuk melihat kondisi keuangan secara menyeluruh pada BUMDes Bina Sejahtera. Untuk kesesuaian dengan SAK ETAP, bisa dikatakan masih belum sempurna dikarenakan hasil dari laporan keuangan yang dibuat hanya terdapat laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi. Laporan yang lainnya seperti laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan belum dimuat dalam laporan keuangan BUMDes Bina Sejahtera.

Melihat laporan keuangan yang telah dibuat oleh BUMDes Bina Sejahtera sudah memuat klasifikasi untuk berbagai akun yang ada, mulai dari laporan posisi keuangan yang terdiri dari harta lancar, harta tidak lancar, dan harta lainnya. Pada bagian pasiva juga sudah terjadi penggolongan mulai dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal. Sama halnya dengan laporan laba/rugi sudah jelas untuk pembagian akun beban yang terdiri dari beban operasional dan non operasional dan pendapatan yang memuat seluruh unit. Adanya pengklasifikasian yang jelas ini dikarenakan BUMDes menggunakan aplikasi akuntansi yakni akubumdes. Dalam laporan yang dibuat walaupun sudah memuat pengklasifikasian yang jelas masih terdapat kekurangan yakni pada nominal pada masing-masing akun, hal ini disampaikan oleh bendahara BUMDes Bina Sejahtera bahwa terkadang dalam memasukkan transaksi pada aplikasi akuntansi masih keliru dikarenakan masih banyak yang belum dipahami. BUMDes Bina Sejahtera telah menyusun laporan tahunan yang memuat berbagai kegiatan BUMDes selama satu tahun dan termasuk laporan keuangan yang dilaporkan setiap akhir tahun.

3. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan BUMDes dimuat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa dan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan-peraturan ini mengisyaratkan BUMDes untuk menyusun laporan keuangan untuk seluruh unit yang ada dengan akuntansi yang sederhana dan setidaknya memuat laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi. Laporan keuangan yang telah dibuat oleh BUMDes Bina Sejahtera telah memuat seluruh unit usaha, masing-masing unit yang ada memiliki laporan keuangan. Selain itu juga masing-masing unit memiliki laporan kas masuk dan kas keluar sebelum dijadikan laporan keuangan oleh pihak pengelola BUMDes, nantinya laporan keuangan masing-masing unit ini digabungkan menjadi laporan konsolidasi. Untuk laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Bina Sejahtera untuk masing-masing unit dan juga konsolidasi nya sudah memuat laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi.

Transparansi Pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Pada BUMDes Bina Sejahtera terdapat banyak sekali dokumen-dokumen, termasuk dokumen kegiatan untuk masing-masing unit. Dokumen seperti catatan penagihan air yang dimiliki PAMDes, dokumen tabungan yang dimiliki LKMS, dokumen rencana kegiatan, jadwal kegiatan, laporan keuangan dan lainnya. Adanya dokumen-dokumen yang telah tersedia di BUMDes Bina Sejahtera bisa diakses langsung oleh masyarakat, bagi yang ingin mengakses dokumen tersebut bisa langsung datang ke kantor BUMDes Bina Sejahtera. Pihak pengelola BUMDes mengatakan bahwa masyarakat yang ingin mengetahui atau meminta dokumen yang ada pada BUMDes bisa langsung datang ke kantor atau bisa menghubungi pihak pengelola.

Ketersediaan dokumen dan akses yang dipermudah oleh pihak BUMDes ternyata belum didukung dengan informasi mengenai ketersediaan dan bagaimana mengaksesnya, sehingga sedikit sekali masyarakat yang memang ingin tahu atau meminta dokumen yang ada pada BUMDes. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak pengelola BUMDes untuk bagaimana memberikan sarana informasi BUMDes kepada masyarakat. Untuk informasi kegiatan-kegiatan BUMDes biasanya pihak pengelola memberikan informasi melalui sosial media, seperti Facebook, Whatsapp, dan Telegram. Akan tetapi dari pihak masyarakat lebih mengetahui informasi kegiatan BUMDes dari Whatsapp saja, sedangkan untuk media sosial lainnya dikatakan belum aktif. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa BUMDes Bina Sejahtera telah tersedia dokumen pengelolaan dan bisa diakses oleh masyarakat.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Ketersediaan dokumen yang ada pada BUMDes Bina Sejahtera haruslah dibarengi dengan adanya informasi yang jelas dan lengkap, dengan harapan dokumen yang disediakan tersebut dapat dengan mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap informasi yang disediakan. BUMDes Bina Sejahtera dalam menjamin bahwa informasi yang disediakan ke masyarakat telah jelas dan lengkap yakni dengan cara mengadakan berbagai kegiatan yang mengumpulkan masyarakat seperti melalui sosialisasi untuk beberapa program contohnya yang telah dilaksanakan seperti tabungan bank sampah dan juga melalui media sosial dengan cara mengirimkan informasi kegiatan maupun dokumentasi kegiatan terutama melalui *Whatsapp*. Selain melalui media sosial untuk informasi kegiatan biasanya juga disebar lewat pihak pemerintah desa dan juga kepala wilayah untuk masing-masing dusun.

Laporan terkait perkembangan pelaksanaan BUMDes biasanya dilakukan setiap bulan pada rapat evaluasi internal pengelolaan BUMDes. Disana disampaikan apa saja yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit, termasuk kendala yang dihadapi, laporan masyarakat, ataupun keberhasilan yang telah dicapai oleh BUMDes. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil rapat evaluasi per bulan yang telah dilakukan oleh BUMDes. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa BUMDes telah menyediakan informasi yang jelas dan lengkap.

3. Keterbukaan Proses

Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan BUMDes Bina Sejahtera diinformasikan ke pemerintah desa dan masyarakat umumnya dilaporkan di akhir tahun pada musyawarah umum. Pada musyawarah umum tersebut disampaikan segala proses yang telah dijalani oleh BUMDes termasuk program-program yang telah berjalan, anggaran yang digunakan, keuntungan/kerugian masing-masing unit dalam bentuk laporan keuangan dan lainnya. Selain dilaporkan di akhir tahun kegiatan-kegiatan BUMDes juga rutin dibagikan melalui melalui media sosial yang dimiliki oleh BUMDes terutama group *Whatsapp*.

Dalam proses pengelolaan BUMDes pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat mengenai kebijakan dan prosedur pengelolaan BUMDes. BUMDes Bina Sejahtera belum memiliki mekanisme atau prosedur operasional standar yang jelas untuk

pengaduan dan pertanyaan. Sementara ini, masyarakat melontarkan pertanyaan dengan berbagai cara seperti melalui Whatsapp, pergi ke kantor BUMDes secara langsung, melalui kelapa wilayah, maupun pihak-pihak pengelola BUMDes yang ada.

Dikarenakan belum adanya mekanisme standar yang diterapkan BUMDes, maka ketika didapatkan pertanyaan maka akan ditampung dan dilaporkan ketika evaluasi bulanan, masyarakat yang datang bertanya dan melapor ke kantor BUMDes akan dijawab langsung oleh pihak BUMDes, selain itu juga pada musyawarah desa akan dijawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada BUMDes. Bisa disimpulkan bahwa walaupun masih terdapat kekurangan pada mekanisme pengaduan pertanyaan atau keluhan terhadap pengelolaan, BUMDes Bina Sejahtera sudah bisa dikatakan terbuka terhadap proses pengelolaan dikarenakan setiap ada agenda BUMDes akan diinformasikan melalui pihak-pihak desa dan media sosial yang dimiliki.

KESIMPULAN

Laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Bina Sejahtera sudah terintegrasi, pengungkapan laporan keuangan yang dibuat sudah memuat kondisi keuangan yang sedang dialami, karena dalam laporan keuangan sudah memuat laporan keuangan untuk masing-masing unit dan memuat laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi. Pada BUMDes Bina Sejahtera sudah tersedia dokumen-dokumen rencana ataupun hasil kegiatan BUMDes dan bisa diakses oleh masyarakat. Walaupun begitu ketersediaan dokumen dan akses yang dipermudah oleh pihak BUMDes belum didukung dengan informasi mengenai ketersediaan dan bagaimana mengakses nya, informasi kegiatan disalurkan melalui sosial media. BUMDes Bina Sejahtera dalam menjamin bahwa informasi yang disediakan ke masyarakat telah jelas dan lengkap yakni dengan cara mengadakan berbagai kegiatan yang mengumpulkan masyarakat dan memberikan informasi lewat pemerintah desa.

Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan BUMDes Bina Sejahtera dilaporkan ke pemerintah desa dan masyarakat pada musyawarah umum desa. Pada musyawarah umum tersebut disampaikan segala proses yang telah dijalani oleh BUMDes. BUMDes Bina Sejahtera belum memiliki mekanisme pasti yang harus dilakukan untuk pengaduan pertanyaan maupun keluhan masyarakat sehingga cara yang umum dilakukan yakni datang ke pihak pengelola BUMDes atau ke pihak pemerintah desa. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu pertama hanya dilakukan di satu BUMDes, selanjutnya informan masih terbatas, kemudian informasi yang didapatkan melalui wawancara masih belum memberikan jawaban yang dibutuhkan secara menyeluruh dari pertanyaan yang diajukan, dan terakhir penelitian ini tidak memiliki keseluruhan dokumentasi yang lengkap dan hanya dikemukakan berdasarkan pada data yang terkumpul melalui wawancara dan observasi.

Saran untuk peneliti selanjutnya hendaknya dilakukan pada cakupan yang lebih luas, selain itu juga indikator yang digunakan dalam penentuan akuntabilitas dan transparansi bisa diperbanyak, begitu juga dengan informan penelitian bisa diperbanyak jumlah dan ragamnya. Selanjutnya hendaknya peneliti berikutnya lebih cekatan dalam bertanya ke informan agar informasi yang didapat jelas dan akurat.

REFERENSI

- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- BPK: *BUMDes Belum Berkontribusi Penuh pada Ekonomi Desa*. (n.d.). Retrieved June 26, 2022, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190529101814-532-399423/bpk-bumdes-belum-berkontribusi-penuh-pada-ekonomi-desa>
- BUMDes Sebagai Pusat Distribusi Bahan Pokok*. (n.d.). Retrieved April 23, 2022, from <https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/bumdes-sebagai-pusat-distribusi->

bahan-pokok

- Fatimah, Ronny Malavia, M., & Wahono, B. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 51–69.
- Haeruddin, & Mariana, L. (2021). Analisis Sistem Akuntansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa). 18(1), 36–45. <https://doi.org/10.31603/ce.v3i2.2454>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- KEMENDESA. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. *Kementerian Desa, PDTT Dan Transmigrasi*, 1–32.
- Manossoh, H. (2016). Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. In *PT Norlive Kharisma Indonesia*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Maslika, Sopanah, A., & Prawestri, H. P. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Conference on Economic and Business Innovation*, 6(2), I. [https://doi.org/10.1016/s1366-0071\(04\)00058-0](https://doi.org/10.1016/s1366-0071(04)00058-0)
- Mendes PDTT Sebut Peluncuran 1.604 Sertifikat Jadi Tonggak Sejarah Pengembangan BUMDes. (n.d.). Liputan6.Com. Retrieved April 23, 2022, from <https://www.liputan6.com/news/read/4816698/mendes-pdtt-sebut-peluncuran-1604-sertifikat-jadi-tonggak-sejarah-pengembangan-bumdes>
- Pakaya, N., & Rorong, A. (2019). Transparansi Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(74).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*. (n.d.).
- Pramita, Y. D. (2018). Analisis Pemahaman Permendes No. 4 Tahun 2015 Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pada Akuntabilitas Pengelolaan Bumdes. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 1–8. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i1.1978>
- Rusdiana, A., & Nasihudin. (2018). Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian. In *Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung*.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABITA.
- Ulum, I., & Sofyani, H. (2016). *Akuntansi (Sektor) Publik*. Aditya Media Publishing.
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>